

BAB II LATAR BELAKANG OPERASI GANYANG MALAYSIA TAHUN 1964-1966

A. Latar Belakang Pembentukan Federasi Malaysia

1. Pendirian Federasi Malaysia

Periode tahun 1960-an merupakan periode dimana dunia terpecah menjadi dua blok, yaitu blok barat yang condong kapitalis dan blok timur yang cenderung sosialis komunis. Indonesia beserta negara tetangga seperti Malaya, Filipina, Vietnam juga merasakan dampak tersebut. Politik luar negeri Indonesia yaitu non-blok berarti tidak mengikuti blok manapun. Selain itu, Indonesia sangat menentang neo-kolonialisme dan neo-imperialisme.

Negara Malaya yang telah mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957 mempunyai gagasan untuk menggabungkan negara bekas jajahan Inggris menjadi satu bernama Persekutuan Tanah Melayu yang kemudian disebut Federasi Malaysia. Negara-negara yang direncanakan masuk ke dalam Federasi Malaysia ini meliputi Malaya, Singapura, Sabah, Serawah, dan Brunai. Gagasan pendirian Federasi Malaysia ini dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaya, Tenku Abdurachman Putra dalam kongres *The Foreign Correspondent's Association of South East Asia* di Singapura yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1961¹.

Tujuan utama dari pendirian Federasi Malaysia adalah menyatukan bangsa Melayu, mengadakan kerjasama/ koordinasi di bidang politik dan ekonomi, memperbaiki perimbangan penduduk sehingga tidak lagi golongan Cina menjadi mayoritas seperti di Singapura, dan membendung masuknya pengaruh dan arus

¹ Departemen Pertahanan Keamanan, *Sedjarah Operasi-Operasi Gabungan dalam Rangka Dwikora*, (Jakarta: Pusat Sedjarah ABRI, 1971), hlm. 3.

komunis². Dengan adanya penggabungan antara negara Melayu dan Singapura dalam Federasi Malaysia diharap golongan Melayu menjadi golongan mayoritas. Walaupun pemerintah Singapura menganut sosialisme modern dan non-komunis, namun dikhawatirkan bila pemerintahan dan pertahanan berada dalam tangan Singapura sendiri akan mudah dipengaruhi Republik Rakyat Cina untuk mengubah politiknya menjadi negara komunis. Selain itu keamanan Malaya di masa lalu sering diganggu oleh golongan komunis yang didukung penduduk golongan Cina. Mengingat wilayah Borneo Utara sebagian penduduknya golongan Cina, dikhawatirkan daerah tersebut akan jatuh ke tangan komunis. Dengan menggabungkan daerah itu dalam Federasi Malaysia, maka pengembangan komunis akan dapat dibendung³.

Inggris mendukung pembentukan Federasi Malaysia didasari atas aspek ekonomi dan pertahanan. Dalam aspek ekonomi, Malaya memiliki perkebunan karet dan tambang-tambang timah yang 70% milik Inggris, Singapura memiliki perusahaan-perusahaan import/ ekspor 60% milik Inggris, dan Brunai memiliki perusahaan minyak bumi hampir seluruhnya milik Inggris. Dalam aspek pertahanan, daerah Malaysia merupakan salah satu mata rantai penting dari garis pertahanan yang membentang mulai dari daratan Inggris melalui Gibraltar, Eden, Singapura sampai New Zealand⁴.

² Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Bandung: Dinas Sejarah Militer TNI-AD, 1985), hlm. 170.

³ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI: Jilid III (1960-1965)*, (Jakarta: Pusjarah TNI, 2000), hlm. 142-143.

⁴ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Op. Cit.*, hlm. 171.

Adanya pengaruh kepemimpinan, dominasi, dan kekuasaan di Malaya oleh Tunku Abdulrahman yang pro-barat menjadikan Inggris mendukung pembentukan Federasi Malaysia, karena dengan itulah Malaysia akan tetap pro-Barat dan Inggris berharap bahwa Malaysia tetap pada haluannya yaitu pro-Barat.

2. Perkembangan Menuju Federasi Malaysia

Pada bulan Juli 1961 diadakan konferensi yang membicarakan Federasi Malaysia di tingkat nasional yaitu *The Commonwealth Parliamentary Association* bersama wakil rakyat dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunai. Konferensi ini atas inisiatif Donald Stephens, Ketua *United National Kadakan Organisation Consultative Committee*. Tugas Komite tersebut adalah untuk mengumpulkan pendapat mengenai Federasi Malaysia dan mendorong untuk mempercepat terbentuknya Federasi Malaysia⁵.

Pada bulan Oktober 1961 untuk membahas dan berunding tentang Federasi Malaysia, Perdana Menteri Inggris Mac Millan dan Perdana Menteri Malaya Tunku Abdulrachman mengadakan pertemuan di London. Hasil dari pertemuan kedua perdana menteri tersebut adalah "*Joint Statement Mac Millan and Abdurachman*" memutuskan bahwa Inggris dan Malaya menyetujui rencana *merger* Singapura – Malaya. Sesuai dengan tema perundingan, maka kedua negara ini akan mengadakan penyelidikan yang mendalam mengenai pembentukan Malaysia dengan panitia yang terdiri dari seorang ketua dan beranggotakan 2 orang dari Inggris dan 2 orang

⁵ Nyoman Arsana, dkk, *Sejarah Operasi Dwikora 1962-1966*, (Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah, 2014), hlm. 14.

dari Malaya. Selain itu, pernyataan bersama tentang persetujuan pertahanan Inggris – Malaya akan diperluas hingga meliputi daerah-daerah Malaysia⁶.

Sebagai realisasi dari *Joint Statement*, dibentuklah suatu panitia yang dipimpin oleh Lord Cobbold yang bertugas untuk melakukan penyelidikan tentang Malaysia dan pendapat dari daerah-daerah lainnya mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Anggota-anggota Cobbold ini terdiri dari Anthony Abell, David Watherston, Dato Wong Poe Nee dan Enche Mohammad Gozali bin Shafei. Hasil penyelidikan panitia Cobbold ini telah dilaporkan dalam buku: “*Report of the Commision of Inquiry, North Borneo and Serawak*, 1962. Dalam buku tersebut dimuat antara lain⁷:

a. Memorandum dari “*Malaysia Solidarity Consultative Commite*”

Isi dari memorandum tersebut adalah bahwa Malaysia merupakan suatu federasi dengan pemerintahan pusat yang kuat yang dipimpin oleh kepala negara yang dipilih di antara Sultan-Sultan Melayu termasuk Sultan Brunai dengan agama negara-nya Islam tetapi tetap diberi jaminan kebebasan memeluk agama lain serta bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Di Malaysia hanya terdapat satu kewarganegaraan yaitu warga negara Malaysia. Penduduk asli bersama-sama dengan penduduk golongan Melayu mendapat hak-hak khusus yang dibedakan dari hak-hak penduduk golongan lainnya. Pernyataan

⁶ Disjarahad, *Buku Sejarah Dokumenter: Konfrontasi terhadap Negara Federasi Malaysia dan Dwikora*, (Bandung: Dinas Pusat Sejarah TNI, 1975), Bundel “A”, Manuskrip.

⁷ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Op. Cit.*, hlm. 172. Keterangan lihat juga, Nyoman Arsana, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

lainnya adalah mengenai keluar/ masuk imigrasi dan pemindaham penduduk antar daerah mendapat pengawasan .

- b. Pendapat pemerintah Serawak dan pemerintahan Borneo Utara Inggris mengenai Malaysia.

Komisi penyelidikan ini tiba di Serawak pada pertengahan Februari 1962 dan melakukan tugasnya selama 5 bulan di Kalimantan Utara. Hasil komisi ini menyimpulkan bahwa⁸:

- a. Sepertiga dari penduduk menyetujui tanpa pembentukan Malaysia, sepertiga lainnya setuju dengan syarat asalkan kepentingan-kepentingan daerah terjamin, sedang sepertiga lainnya terbagi dua yaitu sebagian ingin mendapatkan kemerdekaan dahulu sebelum mengadakan Federasi Malaysia.
- b. Sebelum diberikan kemerdekaan sepenuhnya, disarankan suatu masa peralihan yang tidak boleh lebih dari 10 tahun.
- c. Perhatian sebesar-besarnya hendaknya ditujukan untuk mengadakan pembangunan desa dan memajukan kesehatan, pendidikan, latihan-lathan kerja guna menyiapkan adanya pejabat-pejabat teknis dan administrative.
- d. Penduduk asli hendaknya mempunyai hak-hak yang sama dengan penduduk dari golongan Melayu.
- e. Masing-masing daerah akan tetap mempunyai Mahkamah Tinggi, sedang di pusat terdapat sebuah Mahkamah Agung

- f. Perwakilan bagi daerah-daerah di dalam Parlemen Federasi hendaknya jangan hanya berdasarkan kepada jumlah penduduk, tetapi hendaknya juga dengan mendasarkan kepada luas dan potensi/ sumber-sumber kekayaan daerah-daerah.
- g. Kepala negara Malaysia ditunjuk oleh Yang Dipetuan Agung dengan persetujuan Baginda Ratu Inggris.

Pertemuan antara Tunku Abdulrachman dengan Mac Millan kembali digelar guna memantapkan pembentukan Federasi Malaysia. Pertemuan diadakan pada bulan Juli 1962 di London dengan kesepakatan⁹:

- a. Menerima baik sebagian besar pendapat dan saran yang telah dikemukakan oleh Panitia Cobbald dalam laporannya itu.
- b. Malaysia akan didirikan pada tanggal 31 Agustus 1963
- c. Dalam waktu 6 bulan akan diusahakan/ dipersiapkan pembuatan peraturan (*arrangements*) mengenai penyerahan kedaulatan daerah-daerah Singapura, Serawak, dan Borneo Utara, persoalan yang menyangkut hubungan antara Malaysia Singapura dan pertahanan Malaysia – Inggris serta Konstitusi Malaysia yang di dalamnya memuat jaminan-jaminan dan kepentingan-kepentingan khusus di daerah-daerah Serawak dan Borneo Utara.
- d. Untuk menyusun *arrangements* dibentuk sebuah “*Duler Govermental Committe*” yang terdiri dari Lord Laudrone Menteri Jajahan Inggris sebagai ketua, Wakil Perdana Menteri Abdul Rozak sebagai wakil

ketua, dan anggotanya terdiri dari wakil-wakil Malaya, Serawak, dan Sabah.

Menjelang didirikannya Federasi Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1963, ada beberapa halangan yaitu tuntutan-tuntutan negara Singapura dan Brunai mengenai hubungan keuangan dengan Federasi Malaysia dikemudian hari. Inggris membuka perundingan dengan kedua negara tersebut dengan hasil bahwa Singapura menyetujui untuk menyerahkan anggaran negara sebesar 40% tetapi Brunai tetap bersikukuh tentang permasalahan perekonomian dengan Federasi Malaysia di kemudian hari. Pada tanggal 8 Juli 1963 wakil-wakil dari Malaysia, Singapura, Serawak, dan Sabah menandatangani persetujuan pembentukan Federasi Malaysia yang akan diproklamasikan pada tanggal 31 Agustus 1963.

Brunai yang direncanakan masuk dalam Federasi Malaysia tidak menghadiri upacara penandatanganan persetujuan pembentukan Federasi Malaysia dikarenakan Brunai harus menyerahkan M \$40.000.000 setiap tahun kepada pemerintah federasi¹⁰. Selain itu, Brunai menolak dengan alasan Malaya mengingkari syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tentang kedudukan Sultan Brunai dapat menjadi suatu kemungkinan dipilih menjadi Kepala Negara atau Yang Dipertuan Agung dari Federasi Malaysia. Malaya sendiri keberatan karena ada 9 orang Sultan yang juga menginginkan jabatan sebagai kepala negara tersebut. Untuk memperjuangkan prinsipnya, maka Sultan Brunai pergi ke London dan mengadakan perundingan dengan Menteri Urusan Jajahan

¹⁰ Departemen Penerangan RI, *Gelora Konfrontasi Mengganjang "Malaysia"*, (Jakarta: Deppen RI, 1964), hlm. 66

Inggris, Duncan Sandys. Dengan demikian maka masuknya Brunai ke dalam Malaysia masih bersifat fakultatif¹¹.

3. Pro – Kontra Adanya Federasi Malaysia

Pembentukan Federasi Malaysia mendapat beberapa tanggapan, baik tanggapan positif, tanggapan negatif, bahkan beberapa menunjukkan gelagat pro - kontra dan tanggapan tersebut terjadi di dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Malaysia untuk memulai membentuk sebuah negara.

Tantangan di dalam negeri adalah masyarakatnya sendiri tidak sepenuhnya menyetujui adanya pembentukan Federasi Malaysia, terutama partai oposisi di Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara seperti: *The Pan Malayan Islamic Party*, yang tidak menyetujui pembentukan Malaysia dan mendesak agar dibatalkan persetujuan Malaysia dan menuntut diadakannya Pemilihan Umum; *The Socialist Front* yaitu gabungan dari partai rakyat yang dapat dikatakan sebagai partai orang Melayu dengan Partai Buruh yang berisi orang-orang Cina di Melayu menuntut agar persetujuan Malaysia dibatalkan; *The People's Progressive Party* beranggotakan orang-orang India dan Cina yang mempunyai dasar perjuangan yang anti-Melayu, anti-Indonesia, menentang tiap perjanjian yang menyeret Malaya masuk ke dalam suatu blok, dengan demikian partai oposisi ini juga tidak menyetujui pembentukan Federasi Malaysia¹².

The Council of Joint Action, front ini muncul karena penolakan atas hasil dari memorandum Pemerintah Singapura mengenai penggabungan Singapura dan Malaya ke dalam Malaysia dengan suara 33 lawan 0 dengan catatan 16 orang

¹¹ Nyoman Arsana, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹² Nyoman Arsana, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 20-21.

anggota tidak setuju. Ke-16 anggota ini bergabung menjadi satu front dan menyusun suatu memorandum yang ditandatangani oleh anggota Dewan Legislatif. Memorandum dikirim ke PBB dengan permintaan agar referendum yang diterima oleh Dewan Legislatif Singapura tanggal 6 Desember 1961 dibatalkan. Selain itu reaksi atas gagasan pembentukan Federasi juga datang dari 36 organisasi-organisasi buruh Singapura dan menyatakan bahwa Malaysia merupakan proyek neo-kolonialisme¹³.

Respon kontra datang dari Kalimantan Utara di bawah pimpinan AM. Azahari dengan Pemerintahan Darurat Kalimantan Utara hingga berdirinya Negara Kesatuan Kalimantan Utara (NKKU) yang wilayahnya meliputi Sabah, Serawak, dan Brunai. Proklamasi ini diumumkan di Manila pada tanggal 8 Desember 1961 dengan AM. Azahari sebagai Perdana Menteri. Bersamaan dengan diproklamasikannya NKKU timbul perlawanan yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). Menurut AM. Azahari timbulnya perlawanan tersebut disebabkan Inggris menolak memberikan hak *self determination* dan memaksakan berdirinya Federasi Malaysia; kekuatan TNKU terdiri dari 30.000 orang tersusun dalam beberapa Divisi dan Batalyon; Sultan Brunai berada di pihak pemberontak dan perlawanan tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat¹⁴.

Hal ini mendapat simpati dari Indonesia karena sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta anti neo-kolonialisme dan anti neo-imperialisme. Indonesia turut mengecam karena pembentukan Federasi Malaysia merupakan proyek buatan Inggris. Bantuan dari Indonesia disalurkan melalui

¹³ Nyoman Arsana, dkk, *Op.citi*, hlm.21.

¹⁴ Disjarahad, *Loc. Cit.*

badan-badan perjuangan rakyat yang ditangani langsung oleh pemerintah. Sikap dari Indonesia ini menimbulkan ketidak-senangan Malaya hingga Tunku Abdulrahman menuduhan bahwa Indonesia memasukkan pasukan gerilya ke Kalimantan Utara¹⁵.

Kecaman juga datang dari Filipina. Bagi Filipina jika diambil dari sisi historis dan yuridis, daerah Sabah merupakan daerah milik Sultan Sulu yang disewakan kepada Inggris¹⁶. Dengan demikian timbullah ketegangan antara Filipina dengan Inggris dan Persekutuan Tanah Melayu. Perundingan antara Filipina dengan Inggris mengenai Sabah ini kurang lancar, bahkan dapat dikatakan tidak ada hasil sama sekali.

B. Usaha-Usaha Penyelesaian Adanya Federasi Malaysia

1. Penyelesaian Adanya Federasi Malaysia Melalui Jalan Diplomasi

Pembentukan Federasi Malaysia menuai berbagai problematika karena beberapa pihak setuju maupun tidak setuju atas pembentukannya. Karena itulah, penting untuk menengahi antar beberapa pihak yang bertentangan agar permasalahan ini dapat diatasi. Penyelesaian ini dapat dilakukan secara diplomasi.

a. Konferensi Tingkat Tinggi antara Indonesia – Filipina – Persekutuan Tanah Melayu di Manila.

Pembentukan Federasi Malaysia membuat persetujuan di lingkup internasional, khususnya di wilayah Asia Tenggara yaitu antara Indonesia, Filipina, dan Persekutuan Tanah Melayu. Filipina mengadakan upaya pendekatan kepada

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Op. Cit.*, hlm. 143.

Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu di Manila pada bulan Maret 1963. Wakil dari Indonesia yaitu Pembantu I Menteri Urusan Politik, Suwito Kusumowidagdo. Dari pertemuan ini menghasilkan: a. Sesuai persoalan yang timbul adanya gagasan Malaysia akan diselesaikan melalui cara damai; b. Akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia, Filipina, dan Persekutuan Tanah Melayu¹⁷.

Pada tanggal 31 Mei 1963 diadakan pertemuan di Tokyo oleh Presiden Soekarno dari Indonesia dan Perdana Menteri Tunku Abdulrahman dari Persekutuan Tanah Melayu. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan dengan penuh *goodwill* dan secara bersahabat, serta akan membatasi diri untuk tidak saling melakukan serangan kata¹⁸.

Setelah pertemuan antara Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu, maka diadakan pertemuan lanjutan bersama Filipina. Pertemuan ini adalah pertemuan tingkat menteri yang diikuti oleh menteri luar negeri Dr. Subandrio dari Indonesia, Emmanuel Pelaez dari Filipina, dan wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak dari Persekutuan Tanah Melayu. Dalam pertemuan ini, Dr. Subandrio maupun Emmanuel Pelaez menyatakan bahwa Indonesia dan Filipina tidak berkeberatan akan adanya Federasi Malaysia asal hal itu dikehendaki oleh rakyat Kalimantan Utara¹⁹.

Pada 31 Juli – 5 Agustus 1963 dilanjutkan dengan pertemuan antar ketiga kepala pemerintahan dalam suatu konferensi yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Manila. KTT diikuti oleh Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden

¹⁷ Disjarahad, *Loc. Cit.*

¹⁸ Departemen Luar Negeri, *Malaysia: Masalah dan Perkembangannya dari Semula hingga Maret 1964 III*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 1964), hlm. 41.

¹⁹ Nyoman Arsana, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Diasdado Macapagal dari Filipina, dan Perdana Menteri Tunku Abdulrachman dari Persekutuan Tanah Melayu.

Hasil dari KTT terdiri dari tiga dokumen yaitu: 1. Persetujuan Manila; 2. Deklarasi Manila; 3. Pernyataan bersama Manila dan ditandatangani oleh ketiga kepala pemerintahan. Dalam dokumen Persetujuan Manila yang tertanggal pada 31 Juli 1963 intinya adalah ketiga Kepala Pemerintahan dari Indonesia, Filipina, dan Persekutuan Tanah Melayu menginginkan adanya perdamaian serta saling mengutarakan pendapat mengenai masalah yang menyangkut stabilitas, keamanan, perkembangan ekonomi. Diasdo Macapagal juga berinisiatif mengadakan Konferensi Tingkat Menteri untuk mencapai pengertian bersama dan kerjasama persaudaraan yang erat antar ketiga negara; masalah Sabah dan Malaysia dicapai kesepakatan yaitu hak penentuan nasib sendiri. Indonesia dan Filipina juga menyatakan akan menerima pembentukan Malaysia bila semua itu atas kehendak rakyat dan melibatkan PBB sebagai pihak penengah²⁰.

Pada tanggal 5 Agustus 1963 dicapai pula suatu kesepakatan yaitu Deklarasi Manila yang memuat lima pasal antara lain: 1. Antar ketiga negara ini yaitu Indonesia, Filipina, dan Persekutuan Tanah Melayu meneguhkan kembali kesetiaan mereka kepada azas-azas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa sebagaimana diikrarkan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Bandung; 2. Memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan dan bertekad untuk mengakhiri konflik; 3. Menghimpun usaha-usaha menentang kolonialisme dan imperialisme serta melenyapkan sisa-sisanya; 4. Bahwa ketiga bangsa sebagai kekuatan-kekuatan baru akan bekerja sama dalam membangun

suatu dunia yang baru yang lebih baik yang didasarkan atas kemerdekaan nasional, keadilan sosial, dan perdamaian abadi; 5. Dalam rangka usaha-usaha bersama dari ketiga bangsa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, secara berkala mengadakan musyawarah-musyawarah pada segala tingkat yang disebut Musyawarah Maphilindo²¹.

KTT Manila juga menghasilkan Pernyataan Bersama Manila. Dalam Pernyataan Bersama Manila dinyatakan perlunya mengirim tim-tim peninjau untuk menyaksikan pelaksanaan tugas Tim Penyelidik PBB²² untuk meninjau dan memastikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak.

b. Keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pelaksanaan dari Hasil Konferensi Tingkat Tinggi di Manila.

Dengan berpedoman pada hasil-hasil KTT Manila, ketiga menteri luar negeri dari ketiga negara mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk keikut-sertaan PBB dalam pelaksanaan Persetujuan Manila. Sebagai pihak yang netral, PBB diharap dapat memastikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak sebagai bentuk dari prinsip penentuan nasib sendiri.

Berpegang dengan surat dari ketiga menteri luar negeri dari ketiga negara dan hasil dari konferensi Manila serta dalam rangka adanya Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 (XV)²³, PBB segera memberikan tanggapan dan memenuhi

²¹ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Op. Cit.*, 289-290.

²² Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1996), hlm. 65.

²³ Resolusi PBB No. 1514 (XV) memuat garis-garis besar dari penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah antara lain: "Penggabungan diri dengan bebas haruslah merupakan hasil pemilihan bebas atas kemauan sendiri

tugasnya yaitu mengirimkan tim-tim kerja dan segera membentuk Missi PBB untuk Malaysia. Tim-tim kerja PBB bertugas untuk meninjau dan memastikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak. Tim-tim kerja dibagi dalam beberapa wilayah di Kalimantan Utara, antara lain 2 regu ke Kalimantan Utara, 1 regu ke Sabah, dan 1 regu ke Serawak.

Missi PBB untuk Malaysia dimulai dari tanggal 22 Agustus 1963 diketuai oleh L. Michelmore dari Amerika Serikat. Selain tim kerja dari PBB, peninjau juga ditunjuk dari Indonesia, Filipina, dan Persekutuan Tanah Melayu. Setiap negara berhak untuk mengirim tim peninjau-nya tetapi masuknya tim peninjau dipersulit oleh pihak Inggris. Akibatnya, para peninjau tidak dapat menyaksikan jalannya seluruh penyelidikan, tetapi hanya sepertiga saja dari pekerjaan pengawasan misi PBB di kedua daerah itu²⁴. Tim peninjau dari Indonesia terdiri dari Nugroho S.H., Otto Abdulrachman, Teuku Hasan, dan Rudy Gontha²⁵.

Setelah tim dari PBB menyelesaikan tugasnya, hasil dari misi PBB dilaporkan kepada Sekretaris Jendral PBB pada tanggal 14 September 1963. Berdasarkan laporan dari missi PBB, Sekretaris Jendral PBB menyatakan bahwa sebagian rakyat Sabah dan Serawak menyetujui pembentukan Federasi Malaysia. Pada tanggal 16 September 1963 Federasi Malaysia memproklamirkan diri di kota Kuala Lumpur.

dari rakyat daerah bersangkutan melalui proses-proses yang dimengerti dan demokratis.” (Departemen RI, *Op. Cit.*, hlm. 100)

²⁴ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 463.

²⁵ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Op. Cit.*, hlm. 144.

Dalam misi PBB untuk Malaysia, Indonesia merasakan beberapa kejanggalan dan memandang misi PBB tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik serta cenderung tidak obyektif. Misi PBB beserta pemroklamasian dari Federasi Malaysia dianggap tidak sesuai dengan apa yang telah dituliskan pada hasil KTT Manila. Kejanggalan dari Indonesia ditulis dalam suatu “*Aide memorie*” yang intinya berisi tentang bagaimana tim-tim peninjau dari Indonesia melihat bahwa ada kejanggalan seperti adanya manipulasi dengan kotak-kotak suara oleh pejabat pemerintahan²⁶.

Pendirian pemerintah Indonesia terhadap sikap sepihak Malaya yang telah melanggar persetujuan Manila itu dikemukakan oleh Menteri Subandrio yaitu adanya unsur paksaan dengan mengabaikan hak menentukan nasib sendiridan diperbolehkannya pangkalan-pangkalan militer asing di daerah yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia²⁷.

2. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia

a. Konfrontasi dengan Federasi Malaysia

Setelah melihat hasil misi PBB untuk Malaysia dan disusul pendirian Federasi Malaysia tanggal 16 September 1963, langkah Indonesia adalah berusaha untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia karena Indonesia merasa bahwa pembentukan Federasi Malaysia adalah bentukan negara boneka buatan Inggris yang pada saat itu pemerintahan Indonesia menolak neo-kolonialisme dan neo-imperialisme.

²⁶ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Sejarah TNI-AD, Op. Cit.*, hlm 182.

²⁷ Disjarahad, *Loc. Cit.*

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa lahirnya Malaysia adalah: Prinsipil, bertentangan dengan politik Indonesia yang anti kolonialisme dan anti imperialisme; Prosedural, karena pembentukannya tidak menurut prosedur yang telah ditentukan menurut Resolusi PBB No. 1514 (XV); dilihat dari segi keamanan dan pertahanan akan dapat membahayakan Indonesia²⁸ yaitu adanya pangkalan-pangkalan militer asing yang berada di daerah yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia. mempunyai ikatan pertahanan dan ekonomi yang kuat dengan Inggris²⁹.

Setelah diproklamkan Federasi Malaysia di Kuala Lumpur, tanggal 17 September 1963 pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak dengan Malaysia. Hal itu juga bersamaan dengan terjadinya demonstrasi di Kuala Lumpur terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia dan demonstrasi di Jakarta terhadap Kedutaan Besar Malaysia dan Kedutaan Besar Inggris³⁰.

Pemutusan hubungan itu disusul dengan tindakan pemutusan hubungan lalu lintas ekonomi dengan daerah Malaya dan Singapura. Tindakan ini dilancarkan sejak tanggal 21 September 1963. Pemerintah Republik Indonesia mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan lalu-lintas ekonomi dengan negara Malaysia, kemudian mendolarisasikan³¹ uang di daerah Riau, menjadikan Belawan,

²⁸ *Tantangan terhadap Pemerintah Federasi Malaysia*, Koleksi Dinas Penerangan Angkatan Udara, Arsip Operasi-Operasi Udara dalam Rangka Dwi Komando Rakyat.

²⁹ Leifer, Michael., *Indonesian Foreign Policy*, (London: The Royal Institute of International Affairs, George Allen & Unwin Ltd, 1983), hlm. 59.

³⁰ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Op. Cit.*, hlm. 184.

³¹ Dolarisasi adalah situasi dimana masyarakat pada sebuah negara secara resmi maupun tidak resmi menggunakan mata uang negara lain sebagai alat tukar yang sah dalam melakukan transaksi. Alasan utama dikarenakan mata uang negara tersebut lebih stabil dibanding matamuang negara sendiri.. (Lihat juga, Indira Agustin, *Ekuador* - http://indira-a--fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-48247-

Makassar, Tanjung Pereula sebagai perdagangan bebas (*Free Trade Zone*³²) serta menjadikan pula pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan bebas (*Free Port*). Mendirikan pusat perdagangan (*Trade Center*) bagi hasil-hasil bahan export Indonesia ke negara lain sehingga tidak melalui Singapura lagi. Peleburan biji-biji timah yang semula di Malaya dipindahkan ke Eropa. Begitu pula Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Inggris yang ada di Indonesia³³.

b. Konferensi Tingkat Tinggi II di Bangkok

Permasalahan yang tidak kunjung reda antara Indonesia, Filipina, dan Persekutuan Tanah Melayu yang kemudian menjadi Federasi Malaysia ini menjadikan semakin tidak adanya jalan keluar. Berbagai usaha penyelesaian telah ditempuh dengan adanya pihak ketiga seperti PBB tetapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi beberapa pihak. Negara-negara tetangga seperti Thailand dan Jepang berusaha membuat keadaan agar tidak semakin buruk. Jepang berusaha memusatkan usahanya sebagai perantara antara Indonesia dan Malaysia sedangkan

MBP%20Amerika%20Latin-Ekuador.html, diakses pada 24 Desember 2015 pukul 15.20 WIB)

³² Free Trade Zone (FTZ) adalah wilayah dimana ada beberapa hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan dan mempermudah urusan birokrasi dengan harapan menarik bisnis baru dan investasi asing. FTZ berfungsi sebagai 4 sarana perdagangan bebas, bongkar muat dan penyimpanan barang, serta manufacturing, dengan atau tanpa pagar pembatas di sekeliling wilayah, dengan akses terbatas yang dijaga petugas bea cukai. (Yenny Lay Rade, "*Evaluasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang*", Naskah Publikasi Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang, (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Haji, 2014), hlm. 3-4.

³³ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Loc. Cit.*

Thailand berusaha memulihkan hubungan diplomatik antara Filipina dan Malaysia³⁴.

Pada bulan Oktober 1963 Perdana Menteri Jepang Ikeda berkunjung ke Filipina dan Indonesia untuk membicarakan masalah Malaysia dengan menghasilkan kesepakatan bahwa Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal menyetujui penyelesaian masalah Malaysia melalui jalan damai. Langkah selanjutnya adalah Perdana Menteri Ikeda mengutus wakilnya ke Malaysia untuk menyampaikan hasil pertemuan Perdana Menteri Ikeda dengan Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal³⁵.

Pada bulan November 1963 diselenggarakan konferensi negara-negara Kolombo di Bangkok. Hal ini memberikan peluang Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Koman untuk mengusahakan pertemuan demi mendamaikan Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Tetapi upaya dari Thailand tidak mendapat respon positif karena Malaysia tetap mengajukan persyaratan-persyaratan untuk bersedia bertemu dengan Indonesia dan Filipina antara lain pengakuan terhadap Malaysia, berakhirnya politik konfrontasi Indonesia, penarikan mundur tentara Indonesia dari perbatasan Serawak dan Sabah, penarikan mundur kesatuan infiltran dari Kalimantan Utara, dan pengangkatan suatu negara netral sebagai Juri³⁶.

Semakin keruhnya permasalahan ketiga negara ini menjadikan Presiden Soekarno pada minggu pertama bulan Januari 1964 mengadakan beberapa kunjungan untuk membahas Malaysia antara lain ke Phipilipina, Kamboja, dan Jepang. Pada tanggal 7 sampai 11 Januari 1964 Presiden Soekarno berkunjung ke

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Disjarahad, *Loc. Cit.*

Filipina dalam rangka Musyawarah Maphilindo yang merupakan kesepakatan dari Deklarasi Manila pada KTT Manila.

Di dalam Musyawarah Maphilindo I dirumuskan suatu doktrin mengenai permasalahan di Asia harus dipecahkan oleh orang-orang Asia sendiri yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Soekarno-Macapagal. Namun, masalah pokok yang menjadikan memburuknya hubungan antara ketiga negara itu tetap tidak terpecahkan, disebabkan tidak hadirnya Perdana Menteri Malaya yang telah menjadi Malaysia³⁷. Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal berharap agar musyawarah segitiga dapat diadakan untuk mengatasi perselisihan paham antara ketiga penanda-tangan perjanjian-perjanjian Manila³⁸. Selain itu, hasil dari Musyawarah Maphilindo dengan tujuan membahas tentang Malaysia membuahkan hasil dalam bentuk pernyataan bersama antara Indonesia dan Filipina yaitu:

“Memperhatikan keadaan gawat yang telah timbul di daerah Asia Tenggara selama enam bulan yang silam setelah penandatanganan Perjanjian Manila tersebut dan setelah pelaksanaan yang tidak tepat dan tidak wajar daripada perjanjian-perjanjian tersebut, sebagaimana ternyata dari pengumuman premature tentang pembentukan “Federasi Malaysia” yang mendahului. Terlaksananya penentuan kehendak penduduk daerah Serawak dan Sabah (dahulu British North Borneo) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta pula ternyata dari ketidakmampuan “Federasi Malaysia” untuk memikul tanggung jawab yang diterima oleh dulu disebut Federasi Malaysia, berkenaan dengan klaim Filipina terhadap Sabah, sebagaimana tercantum dalam perjanjian-perjanjian Manila³⁹.”

Amerika Serikat juga turut membantu dalam upaya meredakan permasalahan antar tiga negara tersebut. Dalam kebijaksanaan politik jangka

³⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op. Cit.*, hlm. 464.

³⁸ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm 69.

³⁹ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Op. Cit.*, hlm. 185-186.

panjang antara Amerika Serikat dan Inggris setuju untuk mempertahankan negara-negara non-komunis sebagai benteng pertahanan menghadapi ekspansi Republik Rakyat Cina⁴⁰. Tetapi Amerika Serikat tidak memberi dukungan sepenuhnya karena Amerika Serikat sedang bergejolak dalam perang Vietnam.

Presiden Amerika Serikat Lyndon Baines Johnson memberi amanat kepada Jaksa Agung Robert Kennedy untuk menengahi persengketaan yang terjadi antar tiga negara tersebut. Usaha yang dilakukan Robert Kennedy diantaranya adalah menemui Presiden Soekarno. Tujuan misi yang dikemukakan oleh Robert Kennedy antara lain: a. Untuk membicarakan hal yang menyangkut kepentingan Amerika Serikat, mengingat situasi dan perkembangan yang diakibatkan oleh persengketaan antara Malaysia dan Indonesia; b. Menyampaikan kekhawatiran, seandainya usaha untuk meneruskan penyelesaian mengalami kegagalan⁴¹.

Robert Kennedy juga berusaha mencari jalan agar hubungan dari tiga negara segera membaik. Hal ini dibuktikan hasil dari tercapainya kesepakatan “*cease fire*” atau penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Malaysia pada 23 Januari 1964. Presiden Soekarno menegaskan bahwa: “*Penghentian tembak-menembak tidak boleh dipakai untuk memperkuat atau melemahkan kedudukan masing-masing melainkan dilaksanakan oleh semua pihak untuk menciptakan iklim baik bagi terselenggaranya perundingan*”⁴².

Tercapainya kesepakatan penghentian tembak menembak antara Indonesia dan Malaysia , maka Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah penghentian tembak-menembak yang berisi mengenai bahwa segenap sukarelawan maupun

⁴⁰ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 73.

⁴¹ Disjarahad, *Loc. Cit.* *commit to user*

⁴² Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Op. Cit.*, hlm. 186.

anggota-anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia yang berada di daerah perbatasan Kalimantan Utara untuk dapat menghentikan tembak-menembak mulai tanggal 25 Januari 1964 pukul 00.01 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) serta tetap waspada dan tetap perhatikan keamanan dengan mempertahankan kedudukan. Jika perlu balas setimpal semua tindakan lawan yang melanggar gencatan senjata⁴³.

Setelah tercapainya kesepakatan penghentian tembak-menembak antara, maka diadakanlah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II. Untuk mempersiapkan KTT II, maka diadakanlah Konferensi Tiga Negara Tingkat Menteri terlebih dahulu pada tanggal 5 Februari – 10 Februari 1964 di Bangkok dengan suatu kelompok kerja antara lain Pembantu I Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Duta Besar Jose Engles dari Filipina dan Ghazali Shafei dari Malaysia. Tetapi, dalam kelompok kerja ini tidak mendapat jalan tengah karena Malaysia yang menginginkan penarikan para pasukan gerilyawan Indonesia dari Kalimantan Utara sebelum adanya perundingan kedepan, sedangkan Indonesia baru menginginkan penarikan gerilyawan pada waktu dimulainya perundingan.

Berhubung dengan gagalnya Konferensi Tingkat Menteri II tersebut, Pemerintah Malaysia telah mengambil tindakan-tindakan untuk mobilisasi umum, memanggil para pemuda untuk menyatakan dinas wajib militer dan mengikuti latihan militer. Tidak kurang dari 500.000 orang telah menyatakan kesediaannya⁴⁴.

Dalam bulan Juni 1964, diadakan konferensi di Tokyo antara Presiden Soekarno, Presiden Diasdo Macapagal dan Perdana Menteri Tengku Abdurachman. Dalam usaha mencari penyelesaian secara damai, tidak ada hasil yang diperoleh

⁴³ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Op. Cit.*, hlm. 188.

⁴⁴ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Op. Cit.*, hlm. 190.

dari KTT. Malaysia tetap pada pendiriannya yaitu dengan syarat penghentian permusuhan. Kemudian Malaysia mengajukan masalah ini ke Sidang Umum PBB dengan mengajukan surat pengaduan yang menyangkut persoalan yang disebut “*blatant and inexcusable aggression*” terhadap Malaysia⁴⁵. Inti dari surat ini adalah mengenai pengaduan Malaysia terhadap tindakan Indonesia dengan sikap konfrontasinya yang terang-terangan hingga timbul agresi terhadap Malaysia yang merupakan pelanggaran perdamaian dan melibatkan ancaman bagi perdamaian internasional yang dapat menjadi ancaman keamanan pemerintahan Malaysia.

Pada tanggal 9 September – 17 September 1964 PBB mengadakan pembahasan mengenai apa yang telah diadakan oleh Malaysia dengan agenda tunggal mengenai agresi yang dilakukan oleh Indonesia di wilayah Malaysia yang dipimpin oleh Mr. Platon Marosov dari Uni Soviet, utusan Malaysia diketuai oleh dr. Ismail sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Sujarwo Condronogoro SH. dengan wakilnya L.N Palar serta anggotanya Otto Abdurachman, Sumaryo Sosrowardoyo dan Alex Alatas yang bertugas membeberkan segala kegiatan negara imperialisme dan kolonialis yang merongrong dan membahayakan kedudukan dan perjuangan revolusi Indonesia⁴⁶.

Ketidakharmonisan hubungan antara Indonesia dan Malaysia karena gencaran konfrontasi dari pihak Indonesia terhadap Malaysia membuat Dewan Keamanan PBB menyinggulkan permasalahan sengketa yang bermuara pada rencana negara buatan yaitu Malaysia hingga menimbulkan pembahasan yang tidak kunjung menemukan titik terang.

⁴⁵ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Op. Cit.*, hlm. 191.

⁴⁶ Nyoman Arsana, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 127.

Masuknya Malaysia ke dalam PBB hingga diterimanya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB setelah habisnya masa keanggotaan negara Cekoslavia di Dewan Keamanan PBB selama satu tahun membuat Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Presiden Soekarno tidak mempermasalahkan beberapa bantuan dari lembaga PBB yang telah membantu Indonesia karena Presiden Soekarno yakin Indonesia mampu berdiri di kaki sendiri tanpa bantuan PBB.

c. Kampanya Dwikora terhadap Malaysia

Dengungan konfrontasi Malaysia yang didengungkan oleh Presiden Soekarno kepada Malaysia terus digencar-gencarkan karena Presiden Soekarno anti terhadap neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Gencaran konfrontasi Malaysia ini didengungkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 pada suatu apel besar di depan Istana Merdeka Jakarta yang kemudian dikenal dengan Dwi Komando Rakyat atau Dwikora.

Dalam apel besar ini, inti dari apa yang telah disampaikan oleh Presiden Soekarno adalah tentang memperhebat ketahanan revolusi Indonesia dan membantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunai untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Indonesia menentang adanya Federasi Malaysia ini karena dalam pembentukannya tanpa mempertimbangkan apa yang diinginkan rakyat di dalam negara-negara yang akan menjadi bagian dari Federasi Malaysia tersebut. Selain itu dalam pembentukan Federasi Malaysia terdapat suatu perjanjian dengan Inggris yang di dalamnya Inggris mempunyai beberapa wewenang salah satunya dalam bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan ini, Inggris dapat menempatkan pangkalan militernya

pada daerah Federasi Malaysia yang juga berbatasan langsung dengan Indonesia. Hal ini tentunya dapat membahayakan keamanan dan merupakan suatu ancaman bagi Indonesia.

Gambar. 1

Apel besar yang diselenggarakan di depan Istana Merdeka, Jakarta 3 Mei 1964 dalam apel besar ini Presiden Soekarno mengeluarkan Komando pengganyangan Malaysia yang dikenal dengan Dwi Komando Rakyat.



Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Dalam pelaksanaan Dwikora, pemerintah Indonesia membentuk Komando Siaga (KOGA) yang bertugas untuk mempersiapkan serta menunjang operasi militer terhadap Malaysia dengan beberapa komando gabungan angkatan-angkatan. KOGA berada di bawah Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yaitu Presiden Soekarno. Panglima Komando Siaga (Pangkolaga) dijabat Laksdya Udara Omar Dani (Menpangau), Wakil I Laksda Laut Mulyadi, Wakil II Brigjen A. Wiranatakusumah, dan Kastaf Komodor Iklara L.W.J Wattimena⁴⁷. Untuk

commit to user

⁴⁷ Nyoman Arsana, dkk, *Op. Cit.*, 3.

memperlancar konfrontasi dengan Malaysia ini dilakukanlah konfrontasi bersenjata yang sebagian diambil dari ABRI dengan melibatkan dari kekuatan angkatan udara, laut, darat dan kepolisian serta sukarelawan.

C. Dasar-Dasar Pertahanan dan Kekuatan Militer Malaysia dan Persemakmuran Inggris

Lahirnya Malaysia membuat Inggris beserta sekutunya menancapkan beberapa pangkalan militernya di wilayah Malaysia untuk memperkuat Inggris di bidang pertahanannya di Malaysia. Pada tahun 1963-1964 tercatat beberapa kegiatan pelanggaran-pelanggaran militer baik dari darat, laut, maupun udara yang dilakukan oleh pihak Malaysia – Persemakmuran Inggris hingga pelanggaran wilayah yang terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Inggris membentuk komando gabungan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Walter Walker yang terdiri dari kekuatan Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Jabatannya adalah Direktur Operasi untuk Borneo (Kalimantan) atau DOBOS (*Director of Borneo Operations*). Ia melapor langsung kepada Panglima AP Inggris untuk Timur Jauh (*Commander-in Chief, Far-East Forces*)⁴⁸.

Kekuatan angkatan laut Malaysia - Persemakmuran Inggris mempunyai serangan dan pengintaian yang bagus, pertahanan yang kuat terhadap serangan pihak udara AURI serta dapat melakukan perang anti kapal selam. Sedangkan kekuatan angkatan udaranya diperkirakan mampu melakukan serangan udara yang

⁴⁸ Sukardi, *Saatnya Berbagai Pengalaman dan Rasa*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2010), hlm. 141.

bersifat “strategi *bombing*” dan pertahanan udaranya dengan sistem “*early warning*” yang efektif. Dari angkatan daratnya, kuantitas masih seimbang dengan pasukan Indonesia⁴⁹.

1. Dasar-dasar Pertahanan Malaysia dan Persemakmuran Inggris

a. Kondisi Geografis Kalimantan bagi Pertahanan Malaysia dan Persemakmuran Inggris

Posisi Kalimantan yang merupakan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dimana masih banyak ditemui hutan belantara memudahkan pihak Malaysia – Persemakmuran Inggris untuk menerobos masuk ke dalam wilayah Indonesia melalui jalur udara. Hal ini menjadikan pihak dari Malaysia – Persemakmuran Inggris mendapat akses yang mudah dalam daya gerak strategis.

Alat komunikasi yang baik yang dimiliki oleh pihak Malaysia – Persemakmuran Inggris menjadikan sukarelawan Indonesia susah untuk menerobos dinding pertahanan di perbatasan di sisi Malaysia di Kalimantan. Selain itu, masyarakat yang ada di wilayah perbatasan di sisi Malaysia telah dipindahkan agar sukarelawan Indonesia mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan langsung dengan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.

b. Pembagian Daerah Pertahanan serta Dislokasi Malaysia dan Persemakmuran Inggris

Pihak Malaysia - Persemakmuran Inggris memperkuat kekuatan pertahanannya di sepanjang perbatasan wilayah Malaysia diantaranya di Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara. Malaysia yang dibantu oleh Persemakmuran

⁴⁹ Imran Baidirus, *53 Tahun Skadrons Udara 1: Kini Elang Khatulistiwa*, (Jakarta: Dinas Penerangan Angkatan Udara, 2003), hlm. 110.

Inggris juga memiliki daerah pertahanan di luar wilayah Malaysia yaitu di Australia dan Selandia Baru. Dengan banyaknya titik daerah operasi yang tersebar menjadikan Indonesia terkepung dari berbagai sisi. Menurut penyelidikan dari operasi A, berikut daerah operasi dari pihak Malaysia – Persemakmuran Inggris.

1) Malaya

Malaya merupakan wilayah utama dari Malaysia – Persekutuan Inggris karena Malaya menjadi pusat dari pengawasan kegiatan aktivitas pemerintahan Malaysia. Letak dari daerah operasi Malaysia – Persemakmuran Inggris berada pada posisi garis-garis pantai Malaysia yang berhadapan langsung dengan wilayah Indonesia. Wilayah operasi di Malaya ini tersebar di beberapa titik yaitu di Kedah dengan kekuatan, dislokasi serta letak lapangan terbang di Alor Star, Kuala Kecil, dan Lubok Kiap. Selain itu, berikut wilayah operasi di Malaya dengan kekuatan, dislokasi serta letak lapangan terbang di Wellesley (Butterworth dan Penang), Perak (Taiping, Ipoh, dan Sitiawan), Selagor (Kuala Lumpur dan Port Swettonham), Melaka, Johor (Kluang), Pahang (Kuantan), Kelantan (Kota Bahru, Machang, dan Gong Keda)⁵⁰.

Kekuatan angkatan udara serta dislokasi di Malaya antara lain di Butterworth terdapat jenis pesawat pembom yaitu 1 skuadron *Canberra* dan 10 buah *Gannet*; pesawat pemburu yaitu 2 skuadron *Aver Sabre F – 86*; pesawat pengangkut dengan beberapa buah *Dakota C – 47*; dan helikopter yaitu 4 buah *Iroquis*. Di Kuala Lumpur terdapat jenis pesawat yaitu 14 buah *Twin Pioneer*, 5 buah *Single Engine Pioneer*, 3 buah *Twin Engine Dive*, 4 buah *Handly Page Herald*

⁵⁰ Poengky Poernomo Djati, *Peranan Angkatan Udara Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963*, (Jakarta: Sub Direktorat Sejarah Ditwapersau, 1992), hlm. 11-12.

De Havilland, 2 buah *Herew*; pesawat pengintai yaitu 2 buah *Cessna*; dan helikopter yaitu 8 buah *Aleuotte – III*⁵¹.

2) Singapura

Singapura menjadi zona penting bagi pertahanan Malaysia - Persekutuan Inggris karena Inggris menguasai pertahanan udara dan laut serta disana menjadi pusat pangkalan dari angkatan bersenjataanya dikarenakan mudahnya akses pengiriman bantuan baik dari prajurit maupun persenjataan yang dikirim ke berbagai daerah operasi. Di wilayah operasi ini memiliki beberapa titik dislokasi pasukan musuh dan pangkalan lapangan terbangnya yaitu di Sembawang, Tengah, Selatan, Singapura dan Changi.

Di Singapura juga terdapat dislokasi angkatan udara antara lain di Tengah dan Changi. Di Tengah terdapat jenis pesawat pembom yaitu 3 skuadron *Canberra* dan 1 skuadron buah *Shackleton*, 1 skuadron *Victor Bomber*, 4 buah *Avre Vulcan*; pesawat pemburu yaitu 2 skuadron *Hawker Hunter* dan 3 skuadron *Cl. Javelin Faw – 9*. Kemudian di Changi terdapat pesawat pengangkut yaitu 2 skuadron *Hasting C -1*, 1 skuadron *Twin Pioneer*, 1 skuadron *Beverly C -1*, 1 skuadron *Angsy*, 1 skuadron *Comet 4*, 2 skuadron *Britania*; dan helikopter yaitu 1 skuadron *Belvedero* dan 1 skuadron *Westland W. Wind*⁵².

3) Kalimantan Utara

Wilayah pertahanan pihak Malaysia – Persemakmuran Inggris ini berada di Malaysia Timur dan dikenal dengan *British Borneo*. Berikut dislokasi angkatan udara pihak Malaysia – Persemakmuran Inggris antara lain di Khuching terdapat

⁵¹ Poengky Poernomo Djati, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

⁵² Poengky Poernomo Djati, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

jenis pesawat pemburu yaitu 2 buah *Hawker Hunter* dan 3 buah *G. Javelin*; pesawat transport yaitu 4 buah *Twin Pioneer*; pesawat pengintai yaitu 6 buah *Cessna* dan 2 buah *Auster*; dan helikopter yaitu 2 buah *Belverede*, 7 buah *W. Whirlwind*, dan 5 buah *W. Wessek*. Selain itu di Labuan terdapat jenis pesawat pembom yaitu 1 buah *Shackleton*; pesawat transport yaitu 5 buah *Twin Pioneer*, 1 buah *Britania*, dan 1 buah *C – 47*; pesawat pengintai darat yaitu 6 buah *Skooter*. Dan terakhir di Selton terdapat jenis pesawat transport yaitu 1 buah *C – 47* dan 1 buah *Twin Pioneer*; pesawat pengintai darat yaitu 3 buah *Cessna*; dan helikopter 8 buah *W. Whirlwind* kemudian mendapat tambahan 6 *W. Whirlwind* dari Biwark⁵³.

4) Sekutu-sekutu Malaysia

Malaysia memiliki wilayah operasi di luar wilayah Malaysia yaitu di Australia dan Selandia Baru serta memiliki letak yang cukup strategis karena dapat mengepung wilayah Indonesia dan menjadikan kesiapsiagaan dalam gerak strategis. Kekuatan Angkatan Udara yang telah disiapkan Australia antara lain pesawat pembom dengan 2 skuadron *Canberra Bomber* di Amberley Brisbane, pesawat pemburu dengan 2 skuadron pemburu *Sabre* di Wilhamstone, dan pesawat pengintai dengan 2 skuadron *Neptune* di Townsville, Queensland, Sydney dan Richmond⁵⁴.

2. Kekuatan Angkatan Bersenjata Malaysia dan Persemakmuran Inggris.

- a. Kekuatan Angkatan Darat Malaysia dan Persemakmuran Inggris Bersenjata Malaysia⁵⁵.

⁵³ Poengky Poernomo Djati, *Op. Cit.*, hlm 10-11.

⁵⁴ Poengky Poernomo Djati, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁵⁵ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Op. Cit.*, hlm. 219.

- 1) *Commander in Chief*, Letnan General Sir Richard Howetson
 - 2) Pasukan Gurkha yaitu Divisi ke 17 dengan ditempatkan di Semenanjung Malaya
 - 3) *Royal Marine* dengan 11 *Royal Marine Brigade* diantaranya 7 brigade ditempatkan di Semenanjung Malaya dan 4 Brigade ditempatkan di Kalimantan Utara.
 - 4) Pasukan infanteri dengan 27 Batalyon diantaranya 14 Batalyon ditempatkan di Semenanjung Malaya dan 13 Batalyon ditempatkan di Kalimantan Utara.
 - 5) 2 Batalyon Kavaleri diantaranya 1,5 Batalyon ditempatkan di Semenanjung Malaya dan 0,5 Batalyon ditempatkan di Kalimantan Utara.
 - 6) Artileri terdiri dari 6 Batalyon Artileri Lap dan 2 Batalyon PSU yang ditempatkan di Semenanjung Malaya, 5 Batalyon Artileri dan 1 Batalyon ditempatkan di Kalimantan Utara.
 - 7) Dipersiapkan Zeni sebanyak 4 skuadron di Semenanjung Malaya dan 2 skuadron di Kalimantan Utara.
- b. Kekuatan Angkatan Udara Malaysia dan Persemakmuran Inggris Bersenjata Malaysia⁵⁶.
- 1) Skuadron peluru kendali *Bloodhound ground to air* dan *Weapon System*
 - 2) Pesawat pembom yang terdiri dari
 - a) 1 skuadron *Royal Air Force Neelcan Bomber*

- b) 4 pesawat *Royal Air Force Canberra Bomber*
 - c) 3 skuadron *Canberra Bomber* dari *RAF* dan *RAAF* sebanyak kurang lebih 39 pesawat.
 - d) 1 skuadron bomber dari *RAF/RAAF* sebanyak 15 pesawat.
- 3) Pesawat pemburu yang terdiri dari:
- a) 2 skuadron *Hawker Hunter* dari *RAF* sebanyak 24 pesawat.
 - b) 2 skuadron *Caster Javelin* dari *RAF* sebanyak 24 pesawat
 - c) 2 skuadron *Avon Sabre* dari *RAF* sebanyak 30 pesawat.
- 4) Pesawat pengangkut yang terdiri dari:
- a) 1 skuadron *hosting C – 1 RAF*
 - b) 1 skuadron *Valetta (RAF)*
 - c) 1 skuadron *Twin Pioneer (RAF/RAAF)*
 - d) 1 skuadron *Beverley*
 - e) 1 skuadron *Westland Belvedre (Heli)*
 - f) 1 skuadron Helikopter *Whirlwind*
 - g) 5 buah pesawat anti kapal selam *Westland Wissex*
 - h) 7 buah *Alouette*
- 5) Kekuatan udara Timur Jauh dipersiapkan di Australia yaitu:
- a) Pesawat pembom terdiri dari 2 skuadron *Canberra Bomber* ditempatkan di Amberley dan Brisbane.
 - b) Pesawat pemburu terdiri dari 2 skuadron pemburu *Sabre* ditempatkan di Wilhamstone dan New Castle.
 - c) Pesawat pengintai terdiri dari 2 skuadron *Neptune* ditempatkan di Townville, Queensland, dan Richmond, Sydney.

c. Kekuatan Angkatan Laut Malaysia dan Persemakmuran Inggris Bersenjata Malaysia⁵⁷.

- 1) 3 buah kapal induk dilengkapi dengan 3 jenis pesawat-pesawat yaitu *Buccaneer* dengan satu skuadron, *Sea Vixen* dengan satu skuadron, dan *Scimitar*; 2 buah kapal komando dilengkapi dengan 2 jenis pesawat-pesawat yaitu *W. Whirlwind* dan *Wessex*; 2 buah kapal penjelajah; 2 buah kapal perusak kendali yaitu HMS. *Hampshire* dan HMS *Kent*; 12 buah kapal perusak; 19 buah kapal Fregat; 1 buah *escort maintenance*; 1 buah *Tender SS*; 6 buah *kapal selam*; 3 buah *Tender PR*; 2 buah *Boom Defence Vessel*; 23 buah kapal bantu; 3 buah *Survey Vessels*; dan kapal buru selam.
- 2) Jumlah personel lebih kurang 3.000 orang⁵⁸.

⁵⁷ Poengky Poernomo Djati, *Op. Cit.*, hlm. 8-9

⁵⁸ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Op. Cit.*, hlm. 205.